



Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik

Umu Habibah¹, Maulidya Winatasya², Novia Ayu Dara³, Meinajwa Akbar⁴, Surya Sukti⁵
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: maulidyatasya451@gmail.com

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 01-06-2026 | Diterbitkan: 03-06-2026

ABSTRAK

Artikel ini membahas epistemologi dan pendekatan keilmuan dalam ilmu politik serta perkembangan pendekatan tradisional, modern, dan konvergensi dalam studi politik kontemporer. Epistemologi dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat, sumber, metode, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam konteks ilmu politik, epistemologi menempatkan politik sebagai ilmu yang sistematis, rasional, metodologis, dan dapat diuji secara empiris. Pendekatan tradisional dalam ilmu politik menekankan aspek legal-formal dan institusional, sedangkan pendekatan modern mengedepankan analisis empiris, perilaku politik, dan sistem politik secara menyeluruh. Dengan demikian, perkembangan pendekatan dalam ilmu politik menunjukkan transformasi dari kajian normatif-institusional menuju analisis empiris dan global yang lebih kompleks.

Kata Kunci: ilmu politik, pendekatan, epistemologis, bidang keilmuan

ABSTRACT

This article discusses epistemology and scientific approaches in political science, as well as the development of traditional, modern, and convergent approaches in contemporary political studies. Epistemology is understood as a branch of philosophy that examines the nature, sources, methods, and criteria of truth of knowledge. In the context of political science, epistemology positions politics as a systematic, rational, methodological, and empirically testable science. Traditional approaches in political science emphasize legal-formal and institutional aspects, while modern approaches prioritize empirical analysis, political behavior, and the political system as a whole. Thus, the development of approaches in political science demonstrates a transformation from normative-institutional studies to more complex empirical and global analyses.

Keywords: political science, approaches, epistemology, scientific field

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Habibah, U., Winatasya, M., Dara, N. A. ., Akbar, M. ., & Sukti, S. . (2026). Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 1616-1623. <https://doi.org/10.63822/kxxk2n57>

PENDAHULUAN

Ilmu politik sebagai salah satu cabang ilmu sosial memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, ilmu politik tidak hanya berkembang dari segi objek kajian, tetapi juga dari segi pendekatan dan metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena politik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu politik bersifat dinamis dan terus mengalami pembaruan sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks keilmuan, setiap disiplin ilmu memiliki landasan filosofis yang disebut epistemologi. Epistemologi membahas tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran suatu ilmu. Pemahaman mengenai epistemologi menjadi penting karena akan menentukan cara suatu ilmu dikembangkan, termasuk dalam memilih pendekatan keilmuan yang digunakan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengertian epistemologi dan pendekatan keilmuan menjadi dasar yang fundamental sebelum memahami berbagai pendekatan dalam ilmu politik.

Secara historis, pendekatan dalam ilmu politik dapat dibedakan ke dalam beberapa tahap perkembangan. Pada awalnya, ilmu politik didominasi oleh pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada aspek normatif, institusional, dan deskriptif. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles yang menitikberatkan pada pembahasan tentang negara ideal, konstitusi, serta bentuk-bentuk pemerintahan. Fokus kajiannya lebih pada lembaga-lembaga formal dan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Memasuki abad ke-20, muncul kritik terhadap pendekatan tradisional yang dianggap kurang ilmiah dan terlalu normatif. Hal ini melahirkan pendekatan modern dalam ilmu politik yang lebih menekankan pada metode empiris, kuantitatif, serta penggunaan teori dan konsep yang terukur. Pendekatan ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi dan psikologi, serta munculnya aliran behaviorisme yang berusaha menjadikan ilmu politik lebih sistematis dan berbasis data. Dalam tahap ini, perilaku politik individu dan kelompok menjadi fokus utama kajian.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dan modern memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, muncul pendekatan konvergensi yang berupaya mengintegrasikan berbagai pendekatan yang ada. Pendekatan ini tidak lagi mempertentangkan metode normatif dan empiris, melainkan memadukannya secara komplementer agar analisis politik menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Konvergensi pendekatan mencerminkan upaya untuk melihat fenomena politik secara utuh, baik dari segi nilai, struktur, maupun perilaku.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik menjadi penting untuk memahami perkembangan metodologis dan epistemologis disiplin ini. Dengan pembahasan ini diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai perkembangan dan karakteristik pendekatan dalam ilmu politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan perkembangan pendekatan dalam ilmu politik, khususnya pendekatan tradisional, modern, dan konvergensi.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang membahas epistemologi dan pendekatan dalam ilmu politik. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan epistemologi dan perkembangan pendekatan dalam ilmu politik secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Epistemologi dan Pendekatan Keilmuan

a. Pengertian Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran suatu pengetahuan. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu atau kajian). Maka epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengetahuan. Sedangkan pengertian dari ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, warga negara dan negara, dan antar hubungan antar negara itu sendiri. Dengan demikian secara epistemologi ilmu politik adalah pengetahuan atau ilmu yang memahami dan menjelaskan bagaimana fenomena kekuasaan dan kehidupan bernegara melalui proses pencarian pengetahuan yang sistematis, rasional, metodologis, dan dapat diuji kebenarannya. Ilmu politik tidak hanya bersifat normatif (membahas apa yang seharusnya), tetapi juga empiris (menganalisis apa yang terjadi).

1) Pendekatan Keilmuan

Politik melakukan pendekatan melalui bidang keilmuan yaitu ilmu politik yang merupakan cabang dari ilmu sosial. Ilmu politik dapat dikatakan sebuah ilmu karena memenuhi syarat-syarat sebuah ilmu, yaitu; bersifat objektif, metodis, sistematis, dan universal.

- a) Suatu ilmu pengetahuan harus memiliki objek kajian yang jelas dan khusus. Objek tersebut berupa sekumpulan permasalahan yang memiliki kajian dalam ilmu dapat berupa sesuatu yang benar-benar ada, maupun sesuatu yang kemungkinan ada dan masih memerlukan pembuktian melalui penelitian. Ilmu politik memiliki objek yang dikaji yaitu objek materia (negara) dan objek formal (kekuasaan).
- b) Selain memiliki objek sebuah ilmu pengetahuan juga harus memiliki metode. Dalam ilmu politik terdapat dua metode yaitu metode induksi dan deduksi.
- c) Untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek ilmu pengetahuan harus tersusun secara sistematis agar mengetahui bagaimana hubungan antara sebab akibat menyangkut objeknya.
- d) Suatu ilmu harus bersifat umum, kebenarannya merupakan suatu yang universal tidak bersifat tertentu. Namun meski bersifat universal penerapannya bisa berbeda sesuai konteks sosial, budaya,

dan waktu misalnya dalam ilmu politik konsep demokrasi memiliki sifat universal tetapi dalam penerapannya bisa berbeda disetiap negara.

2. Pendekatan Tradisional dalam Ilmu Politik

Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut, misalnya: Sifat Undang-Undang Dasar serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif, badan eksekutif dan lain sebagainya. Karenanya pendekatan ini disebut juga pendekatan institusional atau legal- institusional. Dengan pendekatan ini, dalam mempelajari parlemen, maka yang diperhatikan adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah (UUD UU, atau Peraturan Tata Tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi serta hasilnya. Beberapa kelemahan pendekatan tradisional, antara lain:

- a. Pendekatan ini tidak meneliti apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah-naskah resmi kenegaraan.
- b. cenderung kurang menyoroti organisasi-organisasi yang tidak formal, seperti kelompok kepentingan dan media massa.
- c. Bahasan lebih deskriptif daripada analitis.
- d. Lebih banyak menggunakan ulasan sejarah, seperti menelusuri perkembangan parlemen.
- e. Lebih bersifat normatif karena fakta dan norma kurang dibedakan, bahkan seringkali saling berkaitan.
- f. Kurang memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori baru.

3. Pendekatan Modern dalam Ilmu Politik

Pendekatan modern dalam ilmu politik merupakan cara analisis yang berkembang untuk menjadikan ilmu politik lebih ilmiah, empiris dan sistematis dibandingkan pendekatan tradisional. Jika pendekatan tradisional lebih menitikberatkan pada aspek konstitusional dan hukum, maka pendekatan modern lebih berfokus pada gejala politik yang nyata dalam masyarakat. Secara umum, ciri-ciri penting pendekatan modern dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bersifat empiris dan ilmiah, yaitu menggunakan metode penelitian seperti survei, observasi, wawancara, dan analisis statistik untuk memperoleh data yang objektif.
- b. Berfokus pada perilaku politik, seperti partisipasi masyarakat, perilaku memilih dalam pemilu, komunikasi politik, serta interaksi antar aktor politik.
- c. Menganalisis sistem politik secara menyeluruh, dengan melihat hubungan antara lembaga negara, kelompok kepentingan, dan lingkungan sosial dalam proses pengambilan kebijakan.
- d. Menghindari penilaian normatif, sehingga lebih menekankan pada penjelasan “bagaimana politik bekerja” daripada “bagaimana politik seharusnya dijalankan.”

Dalam kajian ilmu politik modern dijelaskan bahwa “ilmu politik secara ilmiah mengkaji sistem politik dan perilaku politik untuk memahami bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam suatu masyarakat.” Dengan demikian, pendekatan modern membantu menjelaskan dinamika politik secara lebih objektif, terukur, dan komprehensif.

4. Pendekatan Konvergensi dalam Ilmu Politik

Dalam perkembangan studi ilmu politik kontemporer, pendekatan konvergensi menjadi salah satu kerangka analitis penting untuk memahami perubahan kebijakan, institusi, dan praktik politik dalam konteks globalisasi, integrasi regional, serta perkembangan teknologi. Secara konseptual, konvergensi

merujuk pada kecenderungan unit-unit politik baik negara, pemerintah daerah, partai politik, maupun institusi untuk menunjukkan pola yang semakin serupa dalam periode waktu tertentu. Kemiripan tersebut dapat menyangkut tujuan kebijakan, instrumen yang digunakan, mekanisme implementasi, maupun nilai-nilai normatif yang mendasarinya.

a. Konvergensi Kebijakan (*Policy Convergence*)

Dalam literatur kebijakan publik komparatif, konvergensi kebijakan sering dipahami sebagai peningkatan kesamaan karakteristik kebijakan antar yurisdiksi. Pemikir seperti Christoph Knill menegaskan bahwa konvergensi tidak secara otomatis menjelaskan sebab terjadinya kemiripan, melainkan terlebih dahulu mengidentifikasi adanya peningkatan kesamaan tersebut. Dengan kata lain, pertanyaan awalnya adalah apakah kebijakan menjadi semakin mirip, sebelum menelusuri mengapa hal itu terjadi.

Sementara itu, Colin J. Bennett mengidentifikasi empat mekanisme utama yang mendorong konvergensi:

- 1) Emulasi (*policy emulation*), Negara meniru kebijakan negara lain yang dianggap berhasil.
- 2) *Elite networking*, Interaksi dalam komunitas epistemik dan jaringan kebijakan lintas negara mendorong pertukaran ide dan standar.
- 3) Harmonisasi melalui rezim internasional, Perjanjian internasional atau organisasi regional mendorong penyesuaian regulasi.
- 4) Penetrasi (*imposition*), Faktor eksternal seperti lembaga keuangan internasional atau negara dominan memengaruhi kebijakan domestik. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa konvergensi tidak selalu bersifat linear atau menyeluruh. Pada sektor tertentu misalnya kebijakan fiskal dalam kerangka integrasi regional konvergensi bisa relatif kuat. Sebaliknya, pada isu sensitif seperti kebijakan sosial, pendidikan, atau budaya, tingkat konvergensi sering kali lemah karena dipengaruhi oleh nilai dan struktur domestik yang berbeda.
- 5) Dalam konteks Indonesia, kebijakan penanganan stunting menunjukkan kecenderungan konvergensi melalui integrasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, desa, dan kesejahteraan sosial). Pemerintah pusat merumuskan kerangka aksi nasional yang kemudian diadopsi secara relatif seragam oleh pemerintah daerah. Meski demikian, implementasinya tetap dipengaruhi kapasitas birokrasi lokal dan dinamika politik daerah.

b. Pendekatan Metodologis dalam Mengukur Konvergensi

Salah satu tantangan utama pendekatan konvergensi adalah persoalan metodologi. Banyak studi awal menggunakan pendekatan varian, yakni melihat apakah perbedaan antarnegara semakin mengecil dari waktu ke waktu. Jika variasi menurun, maka dianggap terjadi konvergensi. Namun, Thomas Plumper dan Christina J. Schneider mengkritik pendekatan ini karena tidak mampu menangkap konvergensi bersyarat atau fenomena “klub konvergensi”. Klub konvergensi terjadi ketika hanya kelompok negara tertentu yang bergerak menuju pola yang sama, sementara kelompok lain tidak. Oleh karena itu, mereka menyarankan penggunaan model regresi dinamis yang dapat menguji apakah unit dengan kondisi awal berbeda bergerak menuju titik keseimbangan yang sama. Pendekatan ini memperkaya analisis karena memungkinkan identifikasi pola konvergensi yang lebih kompleks misalnya konvergensi regional di Asia Tenggara berbeda dengan Eropa, atau konvergensi hanya terjadi pada negara dengan tingkat pembangunan tertentu.

c. Konvergensi dalam Teori Demokrasi dan Sistem Kepartaian

Dalam teori demokrasi, konvergensi sering dikaitkan dengan model pemilih median (*median voter theorem*). Teori ini berargumen bahwa partai politik dalam sistem dua partai cenderung bergerak menuju

posisi tengah spektrum ideologi untuk memenangkan suara mayoritas. Namun, perkembangan politik kontemporer menunjukkan bahwa konvergensi platform partai tidak selalu terjadi. Polarisasi ideologis, politik identitas, serta sistem multipartai dapat menghasilkan divergensi atau bahkan ekstremisasi kebijakan.

Konvergensi juga dibahas dalam teori justifikasi politik, khususnya dalam kerangka public reason. Pendekatan “*convergence*” menyatakan bahwa legitimasi hukum dapat tercapai jika suatu kebijakan dapat dibenarkan melalui berbagai alasan berbeda yang dapat diterima oleh warga rasional, meskipun alasan mereka tidak identik. Perdebatan normatif muncul mengenai apakah pendekatan ini benar-benar memperkuat stabilitas demokrasi atau justru mengabaikan kesetaraan substantif dalam partisipasi politik.

d. Konvergensi dalam Tata Kelola Global dan Teknologi

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga melahirkan bentuk konvergensi baru. Andrej Zwitter membahas fenomena *governance convergence* dalam konteks teknologi seperti AI, *Internet of Things* (IoT), dan bioteknologi. Integrasi teknologi lintas sektor memaksa negara mengembangkan kerangka regulasi yang lebih seragam dan adaptif. Dalam situasi ini, regulasi siber, perlindungan data, dan etika AI menunjukkan kecenderungan harmonisasi global, meskipun tetap ada variasi nasional. Konvergensi juga terlihat dalam industri media. Transformasi digital mendorong media cetak mengadopsi format multimedia, multiplatform, dan multichannel. Proses ini bukan hanya teknologis, tetapi juga politis dan ekonomis, karena memengaruhi struktur kepemilikan media, komodifikasi informasi, serta relasi antara negara dan pasar.

e. Dimensi Struktural dan Normatif Konvergensi

Pendekatan konvergensi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif. Di satu sisi, konvergensi dapat dipandang positif karena mendorong standar global mengenai hak asasi manusia, tata kelola yang baik (*good governance*), dan transparansi. Di sisi lain, konvergensi dapat dianggap mengancam otonomi nasional dan keragaman lokal. Ketika kebijakan menjadi seragam akibat tekanan global, muncul pertanyaan apakah keseragaman tersebut mencerminkan kebutuhan domestik atau sekadar respons terhadap tekanan eksternal. Selain itu, konvergensi tidak selalu identik dengan efektivitas. Kebijakan yang tampak mirip secara formal bisa berbeda dalam implementasi dan hasil. Oleh karena itu, analisis konvergensi perlu membedakan antara konvergensi normatif (kesamaan prinsip), konvergensi institusional (kesamaan struktur), dan konvergensi performatif (kesamaan hasil kebijakan).

Pendekatan konvergensi dalam ilmu politik merupakan kerangka analitis lintas level yang mencakup kebijakan publik, sistem kepartaian, teori demokrasi, serta tata kelola global dan teknologi. Secara metodologis, tantangan utama terletak pada pengukuran yang akurat serta kemampuan membedakan antara konvergensi nyata dan keseragaman semu. Secara substantif, konvergensi dapat terjadi melalui emulasi, jaringan elit, harmonisasi internasional, maupun tekanan eksternal. Namun, hasilnya tidak selalu homogen dan sering kali bersifat parsial atau terbatas pada kelompok tertentu. Secara normatif, perdebatan berkisar pada apakah konvergensi memperkuat demokrasi dan tata kelola yang efektif, atau justru mengikis pluralisme, otonomi, dan keadilan politik. Dengan demikian, pendekatan konvergensi bukan sekadar konsep deskriptif tentang kemiripan kebijakan, melainkan alat analisis yang membantu menjelaskan dinamika perubahan politik global dalam era interdependensi dan transformasi teknologi yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

1. Epistemologi merupakan landasan filosofis yang menjelaskan hakikat dan validitas pengetahuan. Dalam ilmu politik, epistemologi menegaskan bahwa politik adalah disiplin ilmiah yang memiliki objek kajian, metode, sistematika, dan sifat universal. Ilmu politik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris karena berusaha menjelaskan fenomena kekuasaan secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya.
2. Pendekatan tradisional menitikberatkan pada aspek *legal-institusional* dengan fokus pada negara, konstitusi, dan lembaga formal. Pendekatan ini bersifat normatif dan deskriptif, serta lebih menekankan teks hukum dan sejarah perkembangan institusi. Kelemahannya terletak pada kurangnya perhatian terhadap dinamika empiris dan aktor nonformal dalam sistem politik.
3. Pendekatan modern berkembang untuk menjadikan ilmu politik lebih empiris, ilmiah, dan analitis. Fokusnya pada perilaku politik, sistem politik, serta penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini berupaya menjelaskan bagaimana politik bekerja secara nyata, bukan sekadar bagaimana seharusnya dijalankan.
4. Pendekatan konvergensi menjelaskan kecenderungan kesamaan kebijakan, institusi, dan praktik politik antarunit politik dalam konteks globalisasi. Konvergensi dapat terjadi melalui emulasi, jaringan elit, harmonisasi internasional, maupun tekanan eksternal. Namun, konvergensi tidak selalu homogen dan sering kali bersifat parsial. Secara normatif, konvergensi dapat memperkuat standar global, tetapi juga berpotensi mengurangi otonomi dan keragaman lokal dan kemaslahatan umat.

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai epistemologi dan berbagai pendekatan dalam ilmu politik, diperlukan penguatan pemahaman konseptual dan metodologis bagi mahasiswa agar tidak hanya memahami politik secara normatif, tetapi juga mampu menganalisisnya secara empiris dan kritis. Pendekatan tradisional dan modern sebaiknya dipahami sebagai tahapan perkembangan keilmuan yang saling melengkapi, sehingga analisis politik dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan menggabungkan aspek kelembagaan, perilaku, serta konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, pendekatan konvergensi perlu dikaji lebih mendalam dalam konteks Indonesia, terutama pada kebijakan publik di tingkat daerah, agar dapat diketahui sejauh mana keseragaman kebijakan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperhatikan dimensi normatif dan dampak sosial dari konvergensi kebijakan, sehingga tidak hanya menilai kesamaan formal antarnegara atau antarwilayah, tetapi juga mengukur keberhasilan implementasi serta implikasinya terhadap demokrasi, otonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Ilham, T., H. Rahman, F. Y. Marta, M. Muslim, T. Nangameka, dan N. Saribulan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Indramayu: Penerbit Indramayu, 2023.
- Joko Indrawan. *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

- Bennett, C. "What Is Policy Convergence and What Causes It?" *British Journal of Political Science* 21 (1991): 215–233. <https://doi.org/10.1017/S0007123400006116>.
- Heichel, S., J. Pape, and T. Sommerer. "Is There Convergence in Convergence Research? An Overview of Empirical Studies on Policy Convergence." *Journal of European Public Policy* 12 (2005): 817–840. <https://doi.org/10.1080/13501760500161431>.
- Hertzberg, Benjamin R. "Convergence's Democracy Problem: A Critique of Kogelmann and Stich." *American Political Science Review* 112 (2018): 423–427. <https://doi.org/10.1017/S000305541700065X>.
- Kabul, Lalu Muh. "Penanganan Stunting dalam Perspektif Model Kebijakan Konvergensi di Kabupaten Lombok Timur." *GANEC SWARA* (2023). <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.618>.
- Knill, Christoph. "Introduction: Cross-National Policy Convergence: Concepts, Approaches and Explanatory Factors." *Journal of European Public Policy* 12 (2005): 764–774. <https://doi.org/10.1080/13501760500161332>.
- Pajriani, T. R., S. Nirwani, M. Rizki, N. Mulyani, T. O. Ariska, dan S. S. A. Harahap. "Epistemologi Filsafat." *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): 282–289. Plümper, Thomas, and C. Schneider. "The Analysis of Policy Convergence, or: How to Chase a Black Cat in a Dark Room." *Journal of European Public Policy* 16 (2009): 1011–1029. <https://doi.org/10.1080/13501760903226724>.